

TENDA BAKAL DIBONGKAR

Warga Kampung Bayam Bertahan dan Masih Perjuangkan KSB

JAKARTA (IM) - Warga Kampung Bayam menegaskan, mereka tetap akan bertahan di tenda meski Kelurahan Papanggo memberikan kelonggaran waktu sampai Jumat (22/9). Untuk diketahui, Kelurahan Papanggo dikabarkan akan membongkar tenda atau tempat tinggal sementara warga Kampung Bayam pada Senin (18/9).

Hal tersebut menyusul adanya imbauan dari Lurah Papanggo, Tomi Haryono, yang tertuang dalam nomor surat 312/AT.13.00. Namun, penertiban diundur sampai beberapa hari mendatang. "Tetap bertahan (di tenda)," kata Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang mewakili warga Kampung Bayam, Minawati, saat ditemui di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/9).

Dalam waktu dekat, warga Kampung Bayam bakal melayangkan surat kepada PT Jakarta Propertindo alias Jakpro dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Warga Kampung Bayam ingin tinggal di rumah susun di Kampung Susun Bayam (KSB).

"Kami enggak mau mengalah. Dalam arti kata, hak yang sudah kami dapatkan dibarengi begitu saja, kami enggak mau. Kecuali, ini dari awal memang bukan milik warga Kampung Bayam, kami pasti mengalah," kata Minawati.

"Ini kan dari awalnya memang untuk warga Kampung Bayam, untuk mereka yang terdampak (dari pembebasan lahan proyek JIS). Kenapa sudah diresmikan, sudah tinggal menerima kunci, malah kayak begini?" imbuh dia.

Minawati memastikan warga Kampung Bayam yang rumahnya terkena pembebasan lahan akibat proyek Jakarta International Stadium (JIS) sudah menerima surat keputusan (SK). Bahkan, masing-masing

warga Kampung Bayam sudah mendapatkan nomor unit hunian untuk tinggal di KSB. Hanya saja, KSB tak kunjung bisa dihuni.

Sebagai informasi, warga Kampung Bayam tergusur dari kediaman mereka imbas pembebasan lahan proyek JIS. Warga sudah tinggal di tenda sejak November 2022. Mereka mengaku tidak sanggup membayar kontrakan dan menolak pindah ke Rusunawa Nagrak.

Warga Kampung Bayam sejatinya merupakan penghuni KSB. Namun, KSB masih belum bisa dihuni hingga saat ini. Salah satu BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo alias Jakpro, merupakan pengelola sekaligus pemilik aset KSB. Namun, lahan tempat KSB itu berdiri merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Vice President Corporate Secretary PT Jakpro, Syachrial Syarif sebelumnya berdalih, Pemprov DKI Jakarta belum memberikan legalitas secara resmi kepada Jakpro untuk mengelola KSB. Walhasil, warga Kampung Bayam belum bisa menghuni KSB.

"Yang jelas, kami masih berdiskusi dengan dinas di Pemprov (DKI) untuk memberikan legalitas ke kami untuk menyewakan (KSB)," ujar Syachrial, Senin (20/2).

Di sisi lain, kata Syachrial, Jakpro juga harus mengetahui sampai kapan BUMD DKI Jakarta itu harus mengelola KSB. Sebab, kepemilikan bangunan KSB beserta lahan tempat berdirinya rusun tersebut berbeda. "Kalau kami bilang bukan kendala, tapi lebih kepada proses legalisasi," tutur Syachrial. "Siapa yang pengelola sebenarnya dan sampai kapan pengelolaan itu, karena kepemilikan lahan dan gedung itu kan kepemilikannya berbeda," sambung dia. ● yan

10 Moge Listrik akan Jadi Pengawal Gubernur Jakarta 2024

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), akan memiliki kendaraan dinas operasional (KDO) roda dua bertengas listrik. Adapun KDO berjenis motor gede (moge) listrik ini akan difungsikan untuk patroli dan pengawalan Gubernur DKI Jakarta.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo tidak menjelaskan lebih detail spesifikasi dan harga moge listrik tersebut yang diren-

anakan mengaspal pada tahun depan.

"Itu rencana tahun depan baru akan diadakan. Spesifikasi, kecepatan maksimalnya nanti lah," jelasnya kepada awak media di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Syafrin menjelaskan, pihaknya berencana menambah 10 KDO roda dua jenis Moge listrik untuk pengawalan Gubernur. Sebelumnya, Dishub DKI memiliki mengadakan 186 motor listrik untuk petugas lapangan. "Karena ini motor listrik besar, ini untuk pengawalan, Patwal," jelasnya.

Sebagai informasi, kendati Syafrin tidak memberikan spesifikasi Moge Listrik yang akan digunakan tahun depan, dari pantauan di lapangan, Moge Listrik tersebut mirip seperti Motor listrik Harley-Davidson LiveWire. Adapun kekuatannya mampu menghasilkan 100 tenaga kuda dan 84 kaki lbs torsi dan melesat dari 0 hingga 100 kilometer per jam dalam hitungan 3 detik saja. Adapun kisaran harga moge listrik itu mencapai Rp1,5 miliar. ● yan

PENGUMUMAN

RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI PT. INSPIRASI MAHA SEJAHTERA (DALAM LIKUIDASI)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Likuidator PT. INSPIRASI MAHA SEJAHTERA (dalam likuidasi), berkedudukan di Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut "Perseroan"), mengumumkan bahwa pencatatan atas kekayaan dan/atau uang Perseroan telah dilakukan dan sehubungan dengan tidak adanya kewajiban pembayaran kepada kreditor, maka Likuidator Perseroan akan melakukan pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan.

19 September 2023
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Berdasarkan Riset Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. KUSUMA DHARMA AGUNG" tertanggal 14 September 2023 Nomor 3, yang dibuat dihadapan Mohammad Younizhart Slamet, S.H., M.Kn., selaku Notaris Pengganti dari Kiki Hertanto, SH, Notaris di Jakarta Barat, telah diputuskan membubarkan Perseroan Terbatas PT. KUSUMA DHARMA AGUNG, berkedudukan di Jakarta Barat dan menunjuk tuannya DARMASTO KUSUMANINGRAT, sebagai likuidator Perseroan.

Bagi Para Pihak yang berkepentingan memiliki tagihan terhadap perseroan, dapat segera menghubungi likuidator dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai dokumen asli dan lengkap ke alamat Jalan Srengseng Raya Nomor 18, RT0001/03, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh likuidator perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jakarta, 14 September 2023

Likuidator,

[Signature]

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



KERJA SAMA BAWASLU DENGAN TIKTOK

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kedua kiri) bersama anggota Bawaslu Lolly Suheny (kiri), Head of Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia Firry Wahid (kedua kanan), dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuady (kanan) berbincang usai penandatanganan kerja sama Bidang Pengawasan dan Penanganan Konten Disinformasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (18/9). Bawaslu berkolaborasi dengan TikTok, platform hiburan digital, untuk melawan penyebaran misinformasi dan disinformasi (hoax) terkait Pemilu 2024 serta menyediakan informasi akurat, memantau, menangani konten disinformasi, dan mempercepat penyebaran informasi terkait Pemilu 2024.

DKI Perluas Layanan Uji Emisi Gratis dengan Tambah Lima Alat Uji

Tambahan lima unit alat uji emisi ini akan disebar di lima wilayah kota se-DKI Jakarta untuk memperluas pelayanan uji emisi secara gratis bagi warga Ibu Kota. Layanan uji emisi kendaraan secara gratis saat ini telah berlangsung di beberapa terminal bus yakni di Pulogebang, Pulogadung, Kalideres, Kampung Rambutan.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas layanan uji emisi kendaraan secara gratis bagi warga dengan menambah sebanyak lima alat uji sebagai upaya memperbaiki kualitas udara di wilayah Jakarta.

"Kami sudah dapat bantuan lima unit alat dari Kementerian Perhubungan untuk uji emisi yang selanjutnya akan digunakan untuk mem-

perluas pelaksanaan uji emisi gratis," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo ketika dihubungi di Jakarta, Senin (18/9).

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan langkah Pemprov DKI Jakarta mengurangi polusi udara melalui uji emisi kendaraan bermotor. Ia mengatakan, layanan uji emisi kendaraan secara gratis saat ini telah berlangsung di

beberapa terminal bus yakni di Pulogebang, Pulogadung, Kalideres, Kampung Rambutan.

Selanjutnya, kata dia, tambahan lima unit alat uji akan disebar di lima wilayah kota se-DKI Jakarta untuk memperluas pelayanan uji emisi secara gratis bagi warga Ibu Kota.

Syafrin menyebutkan, layanan uji emisi secara gratis ini akan berlangsung selama satu bulan.

Ia berharap warga dapat mendatangi tempat-tempat pelayanan, termasuk lima titik lokasi tambahan yang nantinya akan diumumkan, untuk melakukan pengujian emisi kendaraan.

Dengan demikian, kata dia, pada saat pemerintah provinsi bersama pihak kepolisian setempat menerapkan tilang, maka warga yang sudah melakukan uji emisi kendaraan dapat terdeteksi

dalam database aplikasi e-Uji Emisi sehingga tidak terkena tilang.

Lebih lanjut, Syafrin Liputo mengatakan berdasarkan data inventarisasi sumber pencemar udara (polutan) primer di Jakarta, kendaraan bermotor menjadi sumber polutan yang cukup tinggi sekitar 69 persen.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI mendorong untuk dilaksanakan uji emisi secara masif sehingga kendaraan yang melintas di jalanan tidak

melampaui ambang batas emisi gas buang yang dipersyaratkan.

Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI mencatat sudah ada 1.063.595 unit kendaraan roda empat dan 110.650 unit roda dua yang telah melakukan uji emisi.

"Tentu pelaksanaan uji emisi menjadi langkah yang sangat efektif untuk menurunkan sumber pencemar udara primer di Jakarta," katanya. ● yan

Sekda DKI: Sosialisasi Penggantian KTP Warga Jakarta Tunggu UU DKI Rampung

JAKARTA (IM) - Sosialisasi rencana penggantian KTP warga Jakarta usai Ibu Kota pindah masih menunggu perancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) selesai. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono ketika menjelaskan soal rencana penggantian KTP warga ketika Ibu Kota pindah pada 2024.

"Nanti kami pasti akan sosialisasi karena RUU-nya sedang dalam proses penyelesaian. Insya Allah (2024), kami ikuti UU-ya, kalau UU-nya selesai," ujar Joko di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Menurut Joko, pencetakan ulang KTP warga perlu dilakukan dalam rangka penyelesaian status Jakarta, ketika tidak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

"Ya (KTP) itu kan pasti berubah, kan Daerah Khusus Ibu Kota jadi Daerah Khusus Jakarta. Tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," ujar Joko.

Sebagai informasi, Pemerintah berencana tetap menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah berstatus ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara. Wacana ini diusung melalui pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal yang membahas RUU tersebut pada Selasa (12/9/2023) kemarin.

Salah satu hasil dari rapat tersebut ialah mengganti status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pemindahan Ibu Kota Negara, berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula 'Daerah Khusus Ibukota' diarahkan menjadi 'Daerah Khusus Jakarta,'" ujar Sri Mulyani,

melalui unggahan akun resmi Instagram-nya, dikutip Rabu (13/9).

Lebih lanjut bendahara negara itu menjelaskan, RUU DKJ mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, banyak aspek keuangan negara yang perlu diatur dalam RUU DKJ.

"Para menteri lainnya melaporkan penyusunan dan substansi RUU DKJ dan membahas untuk mendapat arahan Presiden @jokowi dan Wapres @kai_marfamin," tulis Sri Mulyani. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pembahasan RUU tentang DKJ selesai pada tahun ini. Regulasi tersebut dibutuhkan agar Jakarta tidak disamakan dengan daerah lain setelah kekhususannya sebagai ibu kota negara dicabut.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Syarif Hiariej mengatakan, penyusunan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta sangat mendesak. Alasannya, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengamankan, sebagai konsekuensi dari pemindahan ibu kota negara, pemerintah dan DPR diwajibkan melakukan perubahan UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI.

"Apabila tidak disiapkan peraturan perundang-undangan yang baru, Jakarta akan disamakan dengan daerah lain pada umumnya di Indonesia atau akan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Edward. ● yan

PENGUMUMAN

Telah kehilangan SK IMB Nomor 09871/IMB/2004 Tanggal 25 Oktober 2004 An. PT. PERKASA INTERNUSA MANDIRI, QQ. KRISTIONO MARTA L (KRISTIONO MARTA LINGGADIHARDJA) (KRISTIONO MARTA)

Bagi pihak yang menemukan dapat menghubungi 0816-1803-126

Kekeringan di Kalideres, Pemprov DKI Sediakan Air Bersih untuk Warga

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyediakan air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas berkeliling mendistribusikan air bersih.

"Kami mendapat laporan adanya krisis air bersih di RT 05, 06, 07, dan 10. Kemudian berkoordinasi dengan BAZNAS (Basis) DKI Jakarta dan PAM Jaya untuk memberikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dikutip dari keterangannya, Senin (18/9).

Isnawa mengatakan BPBD DKI Jakarta menerjunkan sebanyak lima unit mobil tangki air berkapasitas 3.000 liter ke lokasi kekeringan

yang berada di Jalan Utan Jati, Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat. Ia menyebut air tersebut diberikan secara gratis oleh BAZNAS (Basis) DKI Jakarta dan dikoordinasi satu pintu melalui pengurus RW setempat.

Ia menyampaikan BPBD DKI telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti PAM Jaya, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, serta Satpol PP untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan memastikan ketersediaan air bersih bagi warga Jakarta pada April 2023.

"Saya telah menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD untuk berkoordinasi

dengan semua lurah yang ada di Jakarta guna memantau dan melaporkan apabila ada krisis air bersih di wilayahnya," ujar Isnawa.

Isnawa pun mengimbau masyarakat menghemat air bersih dan memberlakukan skala prioritas untuk pemanfaatan air. Masyarakat bisa menghubungi Jakarta Siaga 112 jika mengalami kesulitan air bersih di wilayah masing-masing.

Diberitakan, warga Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, mengeluhkan kekeringan dan kesulitan air bersih. Warga berbondong-bondong antri mengambil air saat mobil tangki air tiba.

Kekeringan juga terjadi di Bekasi dan Bogor akibat kemarau panjang. Di Jonggol, Bogor, misalnya, warga sudah dua bulan kesulitan mendapatkan air. ● yan



OPERASIONAL MUSEUM NASIONAL DITUTUP SEMENTARA Seorang petugas berjalan di samping patung berbentuk pusanar berjudul Ku Yakin Sampai di Sini karya Nyoman Nuarta di Museum Nasional Jakarta, Senin (18/9). Operasional Museum Nasional ditutup sementara untuk proses investigasi pascakebakaran yang terjadi pada Sabtu (16/9).